

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**Anie Muspana Djanggano, Erwin Hadisantoso², Syaiah³**¹²³Universitas Halu OleoEmail: aniemuspanadjanggano@gmail.com**Abstrak**

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik, namun opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal yang diraih BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 belum menjamin terpenuhinya seluruh karakteristik kualitatif laporan keuangan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 65 pegawai, dengan 60 kuesioner yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda berbantuan SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi SIPD dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif secara parsial, serta berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi mempermudah penyajian data secara akurat dan tepat waktu, sementara pengendalian internal yang efektif memastikan keandalan dan keterpercayaan data tersebut melalui mekanisme lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga penguatan kedua faktor tersebut perlu terus dilakukan dalam upaya mewujudkan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, BPKAD.

Abstract

The quality of local government financial reports serves as a manifestation of public accountability, but the unqualified opinion with emphasis of a point achieved by the BPKAD of southeast sulawesi province for the regional government financial report for the 2024 fiscal year does not guarantee the optimal fulfillment of all qualitative characteristics of the financial report. This study aims to analyze the effect of the implementation of the regional government information system and internal control system on the quality of financial reports at BPKAD. The study used a quantitative approach with a purposive sampling technique on 65 employees, with 60 questionnaires analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS. The research findings demonstrate that the implementation of the regional government information system and the internal control system each have a partial positive effect, as well as a simultaneous positive effect on the quality of financial reports. An integrated regional government

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

information system facilitates accurate and timely data presentation, while effective internal controls ensure the reliability and trustworthiness of the data through the control environment, information and communication, and monitoring mechanisms. The study concludes that the implementation of local government information system and internal control systems empirically influences financial report quality therefore, strengthening both factors is essential to ensure that the Southeast Sulawesi Province BPKAD produces financial reports that are relevant, reliable, comparable, and understandable to all stakeholders.

Keyword: Regional Government Information System Implementation, Internal Control System, Financial Report Quality, BPKAD.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi mendorong perusahaan untuk terus berkembang. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi sistem pengelolaan informasi keuangan bagi organisasi yang melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawabannya. Sistem informasi tidak hanya mencakup informasi akuntansi saja tetapi telah meluas pada sistem informasi untuk mengelola sumber daya perusahaan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dicapai pada setiap periode (satu tahun). Laporan keuangan ini menjadi landasan informasi bagi penggunaannya sebagai salah satu elemen dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga digunakan sebagai pertanggungjawaban dan memberikan gambaran indikator keberhasilan satu pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya (Ananda dan Sari, 2020). Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Kebutuhan akan akuntabilitas suatu laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks dan membutuhkan kebijakan yang tepat. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah saat ini diharapkan mampu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih (Pujanira dan Taman, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang ada dalam pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Aturan perundangan yang termuat secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan unit pemerintah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada

masyarakat yakni laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan financial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran keuangan daerah terdiri dari 2 jenis laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sementara itu Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Hasil pengelolaan keuangan daerah dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas yaitu 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, 4) dapat dipahami. Pemerintah dituntut untuk memenuhi seluruh kriteria agar tidak menyebabkan kelemahan administrasi, ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Strata tertinggi dari hasil audit berupa opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini WTP yang diberikan LKPD menunjukkan bahwa entitas pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP, wajar, dan berkualitas. Selain itu, adanya opini WTP memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah berusaha keras melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.

Dalam struktur tata kelola keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki peran strategis dan krusial dalam pengelola keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD berfungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertanggungjawab atas koordinasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Tugas dan fungsi BPKAD mencakup perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, pelaksanaan pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan SKPD, serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah. Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, BPKAD memiliki tanggung jawab untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan dari berbagai SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif dan berkualitas. BPKAD juga berperan dalam menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, serta melakukan pembinaan teknis kepada seluruh SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kedudukan BPKAD ini menjadikannya sebagai garda terdepan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Mardiasmo, 2018).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional dan akuntabel. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, serta pengelolaan pendapatan daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan informasi untuk memantau dan menghimpun data dari setiap daerah agar dapat memberikan

kemudahan yaitu pengolahan data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas dan terstruktur. Informasi ini berupa informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pengintegrasian data khususnya terkait pelaporan keuangan. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diukur mrnggunakan beberapa instrument yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan keuangan atau output dan relevansi sistem. Penerapan SIPD sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan data khususnya dalam data pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Salsabila, 2024).

Sejak diberlakukannya SIPD pada tahun 2020, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah ke dalam sistem tersebut. Transisi dari sistem sebelumnya (SIMDA) ke SIPD menuntut penyesuaian yang signifikan, baik dari segi infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun prosedur dan mekanisme kerja. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan serangkaian bimbingan teknis dan pendampingan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan Implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum adanya SIPD, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk memfasilitasi proses pengelolaan keuangan di daerah mulai dari proses penganggaran, akuntansi, hingga pelaporan. Namun, SIMDA dinilai memiliki berbagai keterbatasan, antarlain belum terintegrasi secara nasional, masih bergantung pada jaringan lokal, serta tidak sepenuhnya mampu mendukung proses pengelolaan data secara *real time*. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan potensi terjadinya perbedaan data antar perangkat daerah (Kuncoro, 2018). Penerapan SIPD diharapkan mampu memperbaiki kelemahan tersebut dengan menyediakan platform yang lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya SIPD, proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, SIPD juga mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi prinsip akuntabilitas publik karena laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun auditor eksternal (Mahmudi, 2019).

Pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk menciptakan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Pengendalian internal di lingkungan pemerintah diharapkan mampu mencegah ataupun mengidentifikasi adanya kesalahan dalam proses akuntansi dan pelaporan sehingga dapat memberikan keyakinan terhadap keandalan dan kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Sistem Pengendalian Internal dibentuk oleh lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan data tahun anggaran 2022-2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 110,15% dari anggaran yang ditetapkan, menandakan adanya over-realisasi yang dapat disebabkan oleh penyesuaian data atau ketidaktepatan perencanaan awal. Namun pada tahun 2023, realisasi pendapatan turun drastis menjadi 81,83%, yang mengindikasikan adanya kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

anggaran. Sementara pada tahun 2024, realisasi pendapatan kembali meningkat menjadi 91,10%, yang dapat mencerminkan adanya perbaikan dalam penerapan sistem informasi dan tata kelola keuangan. Fenomena serupa juga terlihat pada laporan realisasi belanja, di mana terjadi penurunan realisasi pada tahun 2023 sebesar 76,94%, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 91,29%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD yang mulai diberlakukan sejak tahun 2020 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis seperti stabilitas jaringan dan integrasi data antar perangkat daerah, maupun dari sisi sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem tersebut. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan pemerintah daerah. SPI memiliki peran penting dalam memastikan keandalan, ketepatan waktu, dan akurasi data keuangan yang dihasilkan. Fluktuasi realisasi anggaran dapat menjadi indikasi bahwa pelaksanaan pengendalian internal belum berjalan secara optimal, baik dalam aspek pengawasan, evaluasi, maupun komunikasi antarunit kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelemahan administratif dan risiko kesalahan pencatatan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menjadi cerminan nyata kualitas laporan keuangan dan efektivitas penerapan SIPD serta sistem pengendalian internal di lingkungan BPKAD.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 pada 26 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH). Opini diberikan berdasarkan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), yang menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 Tahun terakhir, BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi opini dimasa akan datang. Diantara permasalahan yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain: Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD tidak sepenuhnya memperhatikan ketersediaan dana riil, menyebabkan belanja tidak dapat dibayarkan pada Tahun 2024 dan menjadi utang yang membebani Tahun 2025; Kekurangan Kas Dana BOS-P sebanyak Rp433 juta di lima satuan pendidikan belum dapat dipertanggungjawabkan hingga akhir tahun; dan Sejumlah Aset Tanah dikuasai pihak lain atau dalam status sengketa, yang berisiko menghambat pemanfaatan untuk pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun capaian opini WTP menandakan adanya transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat kelemahan dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah (SIPD) dan efektivitas sistem pengendalian internal. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya penelitian ini untuk dilakukan.

Penelitian mengenai pengaruh implementasi sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun masih terdapat research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianda dkk. (2022) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menemukan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Silviana (2020) yang menemukan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Inkonsistensi hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan kemungkinan dipengaruhi faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Terkait dengan sistem pengendalian internal, penelitian Adah & Nasrullah (2021) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Makassar. Namun,

penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014) menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dalam konteks yang berbeda.

Lebih lanjut, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi SIPD dalam konteks pemerintah Provinsi masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada pemerintah kabupaten/kota dan menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) sebagai objek kajian. Padahal, SIPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan SIMDA, terutama dari aspek integrasi nasional, basis *cloud computing*, dan kemampuan *monitoring real-time* oleh pemerintah pusat. Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya sejak diberlakukannya sistem tersebut pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori kontingensi adalah teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok (*group task situation*) dan tingkat-tingkat gaya kepemimpinannya, kepribadiannya dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya (Fiedler 1967). Selain itu, seorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Menurut teori ini, kinerja kelompok ini kontingensi pada sistem motivasional baik pemimpin dan sejauh mana pemimpin memiliki kendali dan pengaruh dalam situasi tertentu (Chenhall dan Brownell, 1988). Dengan kata lain, tinggi rendahnya prestasi kerja satu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan atau *agency theory* merupakan suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dan untuk memungkinkan agen membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dan rakyat sebagai agen. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal, dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah platform yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyediakan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD semakin diperkuat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini berperan dalam mengintegrasikan berbagai data, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan

anggaran daerah, pembinaan serta pengawasan instansi, dan informasi lain yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah secara efektif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan penataan dokumen rencana daerah sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan SIPD tidak hanya berperan sebagai alat teknologi informasi semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam pemerintahan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara profesional di berbagai aspek pemerintahan daerah memastikan bahwa proses-proses administrasi menjadi lebih terstruktur, akurat, dan sesuai standar. SIPD membantu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan keuangan publik, serta akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, penggunaan SIPD bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga strategi untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “sistem pengendalian intern merupakan suatu proses integral kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai dalam memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pengendalian Intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan dan *fraud* (Afriyanti, 2011). Xu, dkk. yang dijelaskan dalam Mulia (2018) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan (*stewardship*) penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam suatu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah “Laporan keuangan daerah di susun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. Sedangkan menurut Mahmudi (2019) definisi laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan dan seluruh transaksi dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan pelaksanaan pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, serta membantu menentukan kepatuhan peraturan dan undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 45, Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab langsung terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah pengaruh implemetasi sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 129 orang. Dalam penelitian ini, responden yang dijadikan sampel merupakan pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berasal dari Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Divisi Perbendaharaan, dan Divisi Anggaran. Berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang ditetapkan, dari total populasi 129 pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh sebanyak 65 orang responden yang memenuhi seluruh kriteria penelitian, yaitu pegawai yang terlibat dalam siklus pelaporan keuangan daerah, menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta memahami Sistem Pengendalian Internal (SPI). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software Statiscal Package for Social Science (SPSS)*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,010	2,955		1,357	0,180		
	X1	0,284	0,130	0,260	2,186	0,033	0,427	2,341
	X2	0,513	0,103	0,594	4,983	0,000	0,427	2,341
a. Dependent Variable: Y								

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil estimasi tabel dengan menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai koefisien, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\text{Maka diperoleh } Y = 4,010 + 0,284X_1 + 0,513X_2 + e$$

Variabel independen berdasarkan persamaan regresi linear berganda berpengaruh terhadap variabel dependen, maka masing-masing variabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Nilai α merupakan konstanta dengan anggapan variabel independen bernilai tetap atau tidak mengalami perubahan maka Kualitas Laporan Keuangan sebesar 4,010.

b) Nilai Koefisien Beta variabel Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) sebesar 0,284. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami kenaikan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,284. Begitu pula

sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,323.

c) Nilai koefisien Beta variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,513. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami kenaikan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,534. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,513.

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) adalah pengaruh yang dimana ketika Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) ditingkatkan maupun diturunkan maka akan berdampak pada kenaikan maupun penurunan Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Tabel 2
Hasil Uji t Statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,010	2,955		1,357	0,180
	X1	0,284	0,130	0,260	2,186	0,033
	X2	0,513	0,103	0,594	4,983	0,000
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25 (2026)

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa :

1. Pengaruh Variabel Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Hasil uji t menunjukkan bahwa Variabel Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 2,186 dengan nilai signifikansi sebesar 0,033. Nilai t hitung tersebut lebih besar dari t tabel ($2,186 > 2,002$) dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,005 ($0,033 < 0,05$). Maka diambil keputusan bahwa Hipotesis 1 diterima. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan terhadap variabel Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Pengaruh Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Hasil uji t menunjukkan bahwa Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,983 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai t hitung tersebut lebih besar dari t tabel ($4,983 > 2,002$) dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,005 ($0,00 < 0,05$). Maka diambil keputusan bahwa Hipotesis 2 diterima. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 3
Hasil Uji F Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	753,066	2	376,533	53,971	,000 ^b
	Residual	397,668	57	6,977		
	Total	1150,733	59			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, diperoleh nilai F hitung sebesar 53,971 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai F hitung tersebut jauh lebih besar dari F tabel (53,971 > 3,160) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Adapun nilai Regression Sum of Squares sebesar 753,066 menunjukkan bahwa variasi Kualitas Laporan Keuangan yang mampu dijelaskan oleh kedua variabel independen cukup besar dibandingkan dengan nilai Residual sebesar 397,668 yang merupakan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Maka diambil keputusan bahwa Hipotesis 3 diterima. Berdasarkan hasil uji f dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk memprediksi serta menjelaskan perubahan yang terjadi pada kualitas laporan keuangan.

Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik implementasi SIPD pada suatu instansi pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang bertanda positif dan nilai signifikansi yang berada di bawah taraf nyata 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. SIPD merupakan sistem informasi berbasis yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Sistem ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan (*e-Planning*), penganggaran (*e-Budgeting*), pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan (*e-reporting*). Dengan adanya integrasi antarmodul dalam satu platform digital, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi keuangan yang dikelola melalui SIPD terintegrasi dalam satu sistem sehingga memudahkan proses pengolahan dan pelaporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Temuan kuantitatif tersebut mendapat penguatan yang substansial dari data wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan kunci di lingkungan BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh konfirmasi empiris bahwa SIPD telah mengubah paradigma kerja pengelolaan keuangan secara fundamental. Informan menegaskan bahwa "*proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari bahkan jam*", yang mengindikasikan adanya efisiensi

operasional yang signifikan sebagai implikasi langsung dari implementasi SIPD. Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa "*proses pencatatan transaksi keuangan sudah terotomatisasi dan data dapat diakses secara real-time*", sehingga meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini relevan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mensyaratkan informasi keuangan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam aspek kepatuhan terhadap SAP, hasil wawancara mengungkapkan bahwa "*output laporan yang dihasilkan SIPD sudah mengacu pada format SAP*" sehingga seluruh komponen laporan keuangan wajib, seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dapat dihasilkan secara langsung melalui sistem tanpa memerlukan banyak penyesuaian manual. Kondisi demikian secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dari sisi komparabilitas dan keandalan data.

Meskipun demikian, wawancara juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi SIPD yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya kesiapan sumber daya manusia yang masih bervariasi antarindividu serta gangguan stabilitas infrastruktur jaringan yang terkadang menghambat kelancaran akses sistem. Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengambil langkah-langkah strategis berupa penyelenggaraan pelatihan internal dan bimbingan teknis secara rutin, penerapan manajemen hak akses berbasis tupoksi, serta pelaksanaan evaluasi berkala atas log aktivitas pengguna dan pencadangan (backup) data secara periodik. Respons institusional semacam ini mencerminkan adaptabilitas organisasi dalam menyelaraskan implementasi sistem dengan kapasitas dan konteks organisasi yang sesungguhnya. Penemuan ini sejalan dengan teori kontigensi yang menjadi dasar penelitian ini. Dimana teori tersebut menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan faktor-faktor kontekstual yang melingkupi organisasi, seperti kompleksitas tugas, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Dalam konteks penelitian ini, implementasi SIPD akan memberikan pengaruh yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan apabila disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik instansi, termasuk kesiapan aparatur pengelola keuangan, kelengkapan infrastruktur jaringan, dan dukungan regulasi internal yang memadai. Dengan kata lain, Teori Kontigensi menegaskan bahwa keberhasilan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tidak bersifat mutlak dan seragam, melainkan sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut diterapkan secara adaptif sesuai dengan konteks dan karakteristik organisasi yang bersangkutan.

Penelitian ini diperkuat oleh studi sebelumnya. Yulianda dkk. (2022) dan Katili dkk. (2025) yang menemukan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Putra (2022) dan Hardianti dkk. (2025), yang juga menemukan bahwa penerapan sistem informasi (SIPD) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan relevansi, reliabilitas (melalui validasi otomatis), dan komparabilitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat hipotesis pertama bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diperoleh bukti empiris bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi bertanda positif dan nilai signifikansi yang lebih

kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif pada pemerintah daerah secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian ini mendapat landasan teori yang kuat dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif terdiri dari lima komponen, yaitu : (1) lingkungan pengendalian (*control environment*), (2) penilaian risiko (*risk assessment*), (3) aktivitas pengendalian (*control activities*), (4) informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta (5) pemantauan (*monitoring*). Kelima komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem pengendalian yang andal dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Temuan kuantitatif tersebut mendapat penguatan yang signifikan dari data wawancara. Informan mengonfirmasi bahwa mekanisme SPIP di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara diimplementasikan secara komprehensif dengan merujuk pada kelima komponen PP Nomor 60 Tahun 2008. Dalam dimensi aktivitas pengendalian, informan menjelaskan penerapan prinsip *dual control* dalam setiap transaksi keuangan, yang meliputi pemisahan tugas (*segregation of duties*) secara tegas antara operator yang menginput data, verifikasi yang memeriksa kebenaran data, dan pejabat yang mengotorisasi transaksi. Struktur otorisasi berlapis semacam ini secara teoritis terbukti efektif dalam meminimalkan risiko kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*) dalam proses pelaporan keuangan. Di samping itu, BPKAD juga melaksanakan rekonsiliasi berkala antara data dalam SIPD dengan dokumen sumber, yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini atas potensi ketidaksesuaian data. Dalam dimensi lingkungan pengendalian, wawancara mengungkapkan bahwa "*pimpinan selalu menekankan pentingnya integritas dan nilai etika, serta struktur organisasi telah dirancang untuk mendukung pemisahan fungsi yang efektif*". Pernyataan ini menegaskan bahwa lingkungan pengendalian di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah terbentuk dengan cukup solid, sebagaimana tercermin dari komitmen pimpinan yang konsisten dalam menginternalisasi nilai nilai integritas ke seluruh jenjang organisasi. Hal ini senada dengan argumen COSO (2013) bahwa *tone at the top* merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Dalam dimensi pemantauan, hasil wawancara menunjukkan adanya koordinasi yang intensif antara BPKAD dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi SPIP dilaksanakan melalui dua jalur secara paralel, yaitu evaluasi internal oleh tim SPIP BPKAD secara mandiri dan evaluasi eksternal oleh Inspektorat Provinsi. Setiap temuan didokumentasikan dan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkret dan terukur, serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala BPKAD dan Gubernur. Mekanisme pemantauan berlapis semacam ini mencerminkan penerapan SPIP yang tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi telah berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam perspektif teori keagenan, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang bertujuan untuk memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat). Pengendalian internal yang kuat mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal, karena setiap transaksi keuangan diverifikasi, diotorisasi, dan didokumentasikan secara sistematis.

Implementasi SPIP yang efektif tersebut secara empiris tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024. Perlu dicermati bahwa dalam proses pemeriksaan BPK, salah satu kriteria utama pemberian opini adalah efektivitas sistem pengendalian intern, di samping kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, capaian opini WTP-PSH tersebut merupakan validasi eksternal yang memperkuat kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aditya & Sujono (2017), Mulia (2018), Putra (2022), dan Katili dkk. (2025). Penelitian-penelitian ini konsisten membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif (meliputi lima komponen SPIP) secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, menjamin keandalan, dan meminimalisasi kesalahan atau penyimpangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan faktor krusial yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penguatan SPIP perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah, antara lain melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penerapan audit internal yang berkualitas, serta internalisasi budaya pengendalian di seluruh jenjang organisasi. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi melalui wawancara, di mana informan menegaskan bahwa ke depan BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna meningkatkan kualitas laporan keuangan menuju opini WTP tanpa penekanan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah pun dapat terjaga secara berkelanjutan.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Selain pengujian parsial, penelitian ini juga melakukan pengujian pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara Implementasi SIPD dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui uji F. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 53,971 yang jauh lebih besar dari F tabel (3,160) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Besaran nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,654 mengindikasikan bahwa 65,4% variasi kualitas laporan keuangan mampu dijelaskan oleh implementasi SIPD dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SIPD dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi dan penerapan mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan secara menyeluruh. Temuan simultan ini mendapat konfirmasi yang sangat kuat dari data wawancara. Informan secara eksplisit menegaskan bahwa "*SIPD menyediakan infrastruktur teknologi yang memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara sistematis, sementara SPIP memastikan bahwa setiap proses yang berjalan dalam SIPD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku*". Pernyataan tersebut secara tepat menggambarkan relasi simbiotik antara kedua variabel: SIPD berperan sebagai infrastruktur digital yang mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh siklus keuangan daerah, sementara SPIP berperan sebagai kerangka pengawasan yang menjamin validitas, kepatuhan, dan integritas setiap proses yang berlangsung di dalam sistem. Kombinasi kedua unsur ini, sebagaimana diakui informan, menghasilkan laporan keuangan yang "*tidak hanya cepat tersusun, tetapi juga andal*,

relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami" yang merupakan pemenuhan terhadap seluruh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan SAP.

Secara operasional di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, wawancara mengungkapkan bahwa mekanisme SPIP yang dijalankan secara paralel dengan pengoperasian SIPD meliputi pemisahan tugas antarfungsi keuangan, otorisasi bertingkat atas setiap transaksi yang diinput ke dalam sistem, rekonsiliasi berkala antara data SIPD dengan buku besar, serta pengawasan aktif oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara selaku APIP. Sinergi operasional semacam ini memastikan bahwa potensi kelemahan teknis dalam sistem dapat dideteksi dan dikoreksi secara dini melalui mekanisme pengendalian manual yang melengkapinya, sehingga integritas data yang tersimpan dalam SIPD senantiasa terjaga. Dalam perspektif teori keagenan, sinergi antara SIPD dan Sistem Pengendalian Internal menciptakan mekanisme pelaporan yang efektif bagi pemerintah daerah (agen) dalam menjalankan tanggung jawab pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan pemerintah pusat (prinsipal). Sistem yang kuat didukung pengendalian internal yang optimal akan mempersempit kesenjangan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Teori Kontigensi juga mendukung temuan ini secara simultan. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada suatu sistem atau pendekatan manajemen yang secara universal terbaik untuk semua situasi, melainkan efektivitas suatu sistem sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan faktor-faktor kontekstual yang melingkupi organisasi. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan peningkatan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dicapai hanya melalui implementasi SIPD semata maupun hanya melalui penguatan SPIP secara terpisah. Implementasi SIPD yang diselaraskan dengan penguatan Sistem Pengendalian Internal merupakan kombinasi yang paling sesuai (*fit*) dengan karakteristik dan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bukti empiris atas sinergi kedua variabel tersebut tercermin dari perolehan opini WTP-PSH dari BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024. Informan juga menggarisbawahi komitmen institusional ke depan, yaitu fokus pada tiga agenda strategis: peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta internalisasi budaya pengendalian di seluruh jenjang organisasi. Komitmen tersebut selaras dengan rekomendasi BPK yang terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas laporan keuangan menuju opini WTP penuh tanpa penekanan. Penelitian ini diperkuat oleh berbagai studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Penelitian didukung kuat oleh penelitian Putra (2022) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula dengan hasil penelitian Katili dkk. (2025) yang juga menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kombinasi antara data kuantitatif, konfirmasi wawancara, dan konsistensi dengan literatur terdahulu secara keseluruhan memperkuat hipotesis ketiga bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,186 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,033 yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi SIPD dalam hal kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan penggunaan sistem, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,983 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 53,971 yang jauh melampaui nilai F tabel sebesar 3,16 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,654 Menunjukkan Bahwa Sebesar 65,4% Variasi Kualitas Laporan Keuangan mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel Implementasi SIPD dan Sistem Pengendalian Internal, sedangkan sisanya 34,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, maupun faktor kepemimpinan dan budaya organisasi. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian tidak hanya pada BPKAD, tetapi juga pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau pada pemerintah lainnya, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adah, S. ', & Nasrullah, M. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan*. In Jurnal Akuntansi Publik (Vol. 1, Issue 1).
- Aditya, O. R., & Surjono. W., (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, Vol 2 No 1, 49-62
- Ananda, F., & Sari, M. P. (2020). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman)*. Jurnal Pundi, 4(2).
- Fiedler, F. 1967. *A Theory Leadership Effectiviness*. (McGraw-Hill, Ed.). New York.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Katili, S. T., Blongkod. H., & Pakaya. L., (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 6 No 3, 1938-1947
- Kuncoro, M. (2018). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mulia, R. A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)*. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 7-21.
- Pemerintah Pusat. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Putra, A. P. (2022). *Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Salsabila, A. (2024) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kabupaten Bantul*.
- Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). *Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi Dan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 794-804.